

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Provinsi DKI Jakarta mempunyai luas daratan 661,52 km² dan lautan 6.977,5 km² serta tercatat ±110 pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu. Secara administrasi, Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah Kotamadya dan 1 Kabupaten Administrasi yaitu Jakarta Pusat dengan luas daratan 47,90 km², Jakarta Utara dengan luas daratan 154,01 km², Jakarta Barat dengan luas daratan 126,15 km², Jakarta Selatan dengan luas daratan 145,73 km², Jakarta Timur dengan luas daratan 187,73 km² dan Kabupaten Adm.Kepulauan Seribu.

4.1.1 Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur

Berdasarkan tugas Pokok dan Fungsinya (Tupoksi) Pemerintah Provinsi Jakarta Timur dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan yang dilimpahkan dari Gubernur, rumusan Visi Kota Administrasi Jakarta Timur untuk diangkat dalam Renstra Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2018-2022.

Visi yang ditetapkan tersebut merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategi sesuai kondisi obyektif dalam lima tahun kedepan, yaitu “Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur yang berorientasi kepada pelayanan publik menuju kota berekonomi modern.” untuk membawa kota Administrasi Jakarta Timur menjadi perangkat daerah yang dapat melaksanakan tugas dan fungsinya (Tupoksi) secara profesional, transparan, akuntabel.

Misi Kota Administrasi Jakarta Timur mewujudkan Jakarta Timur sebagai kota modern yang tertata serta konsisten dengan rencana tata ruang wilayah, menjadikan Jakarta sebagai ibu kota yang bebas dari masalah-masalah menahun seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah, dan membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga memiliki kesadaran dalam memelihara kota.

4.1.2 Aspek Geografis Kota Jakarta Timur

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan salah satu wilayah administrasi di bawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Secara geografis letak Kota Administrasi Jakarta Timur pada posisi antara $106^{\circ} 49' 35''$ Bujur Timur dan $06^{\circ} 10' 37''$ Lintang Selatan. Luas wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur mencapai $187,75 \text{ km}^2$ atau mencapai $28,37 \%$ dari luas total wilayah Provinsi DKI Jakarta. Dari luas ini sebagian besar terdiri dari dataran rendah. Pemerintah kota administrasi Jakarta Timur di bawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Wilayah kota administrasi Jakarta Timur dibagi ke dalam 10 Kecamatan, yaitu Kecamatan Pasar Rebo, Cipayung, Kramatjati, Ciracas, Makasar, Cakung, Jatinegara, Duren Sawit, Pulogadung dan Matraman. Wilayah kota administrasi Jakarta Timur memiliki perbatasan sebelah utara dengan kota administrasi Jakarta Utara dan Jakarta Pusat, sebelah timur dengan Kota Bekasi (Provinsi Jawa Barat), sebelah selatan Kabupaten Bogor (Provinsi Jawa Barat) dan sebelah barat dengan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Wilayah kota administrasi Jakarta Timur memiliki 10 Kecamatan yang terbagi menjadi 65 Kelurahan, terdiri dari 95% daratan dan selebihnya terdiri dari rawa atau persawahan dengan ketinggian rata-rata mencapau 50 meter dari permukaan air laut. Wilayah ini dilalui oleh 7 (tujuh) sungai/kali yaitu Kali Ciliwung, Kali Sunter, Kalimalang, Kali Cipinang, Kali Buaran, Kali Jatikramat, dan Kali Cakung. (BPS, Jakarta Timur, 2022)

Peta Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada **Tabel 4.1. dan Gambar 4.1.** sebagai berikut

Tabel 4.1 Narasi Peta

Judul	Peta Administrasi Jakarta Timur
Tahun	2015
Sumber	-
Ukuran Kertas	A1-Portrait

4.1.3 Aspek Demografi

Pemerintah Kota administrasi Jakarta Timur Secara demografis, merupakan kota yang paling luas di antara kota-kota lainnya di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Kota Administrasi Jakarta Timur juga memiliki jumlah penduduk yang paling banyak. Berdasarkan sumber data Sulin Kependudukan Jakarta Timur, jumlah penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur sampai dengan Bulan September tahun 2014 adalah 2.738.033 jiwa, yang terdiri dari 1.409.296 laki-laki dan 1.409.290 perempuan. Tingkat pertumbuhan penduduk juga mengalami peningkatan dari 0,75% pada tahun 2009-2010 menjadi 1,94 % pada periode tahun 2010-2012. Sementara untuk rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur cukup tinggi, yaitu sekitar 14.562 jiwa/km² dengan kepadatan penduduk yang paling tinggi adalah Kecamatan Matraman mencapai 38.482 jiwa/km² dan yang terendah adalah Kecamatan Makasar sebesar 7.140 jiwa/km². Dari jumlah tersebut di atas, penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur terdiri dari multi etnis, hampir semua ragam suku di Indonesia dengan membawa serta agama, adat istiadat, seni budaya dan kebiasaan dikampung halamannya, melihat kondisi tersebut maka dalam pelaksanaan pembangunan perlu memperhatikan faktor-faktor obyektif yang diuraikan di atas. (Sudis Jakarta Timur, 2022).

4.1.4 Kondisi Keuangan Pemerintah Kota Jakarta Timur

Manajemen pemerintahan tentang paket Undang-undang Keuangan Negara yaitu UU No.17 tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004 terkait perbendaharaan Negara dan UU No.15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Asas-asas umum pengelolaan keuangan negara yang mengakomodasikan praktik-praktik terbaik dalam kaitan dengan penyelenggaraan *good governance*. Asas akuntabilitas berorientasi hasil (*Result Oriented Accountability*) atau yang umumnya dikenal dengan istilah akuntabilitas kinerja (*Performance Accountability*) dan transparansi (*Transparency*) dalam pengelolaan keuangan negara merupakan perubahan paradigma yang signifikan, untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja

pemerintah daerah, sejak tahun 2003, Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).

Kondisi keuangan pemerintah Kota Jakarta Timur terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel seperti meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan daerah dengan sumber daya manusia sebanyak 1290 pengelola, tersusun 95 laporan pengelolaan keuangan, tersusun 60 laporan dan 10 dokumen seluruh tahap pengelolaan keuangan serta termonitoring 750 SPD, Tertagihnya 10 paket tagihan pihak ketiga dan rapel gaji/tunjangan, tersedianya 5 paket biaya transport untuk kegiatan/rapat dinas di Provinsi DKI Jakarta, terakomodirnya kegiatan yang bersifat insidental.

4.1.5 Profil Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah merupakan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas dalam melakukan pemungutan, penagihan dan pengawasan pajak, retribusi pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. BPRD memiliki visi memberikan pelayanan yang profesional dalam optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah yang dibagi menjadi 5 suku badan pendapatan daerah dengan 4 kota dan 1 kabupaten yaitu Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Barat, Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Selatan, Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Pusat, Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Timur.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dibentuklah Badan Pajak Dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta. Struktur Organisasi Badan Pajak Dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 262 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta. Setelah itu, BPRD berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta sesuai pada Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

4.2 Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

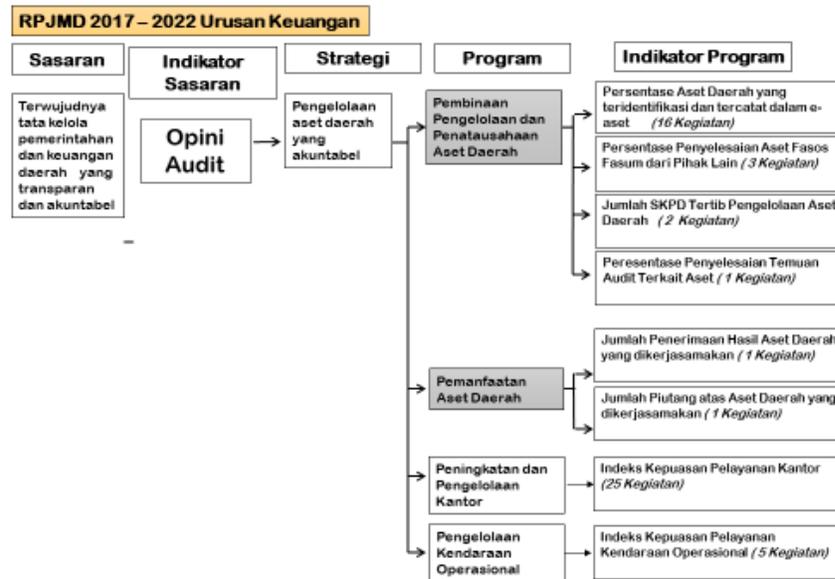
Mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 145 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD), Badan Pengelolaan Aset Daerah pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa BPAD menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran BPAD.
- b. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan.
- c. Perumusan kebijakan, pedoman, standar dan prosedur Badan.

Pelaksanaan tugas pemerintahan di BPAD Provinsi DKI Jakarta, program kegiatan yang termasuk dalam urusan keuangan berdasarkan RPJMD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022, adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Daerah.
2. Program Pemanfaatan Aset Daerah.
3. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor.
4. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022 terkait urusan keuangan memiliki alur yang menjalankan tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi) antara lain sasaran, indikator sasaran, strategi, program, indikator program. **Gambar 4.2.**



Gambar 4.2 RPJMD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

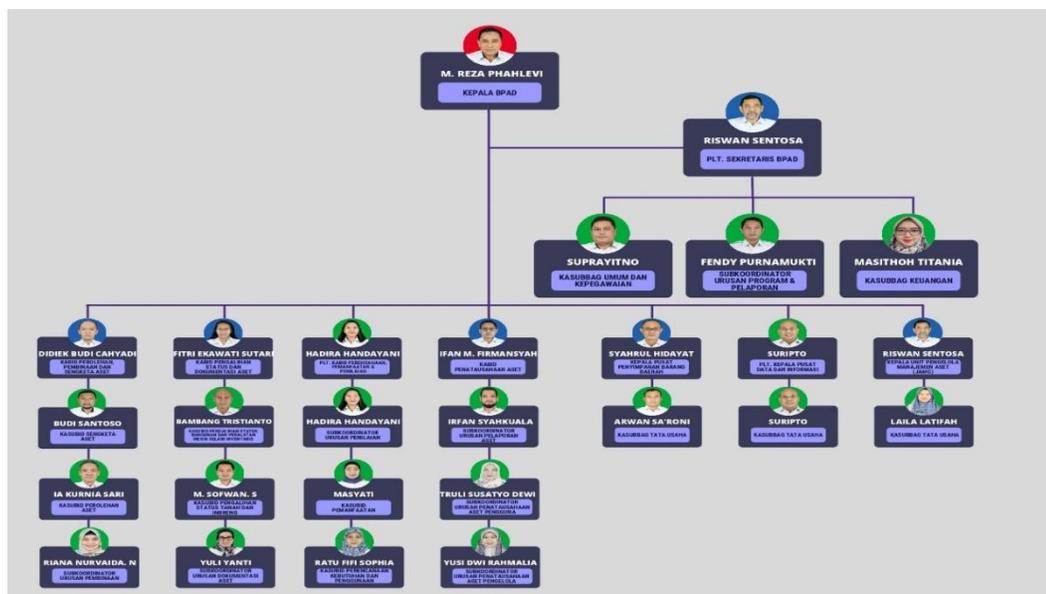
Sumber : BPAD Provinsi DKI Jakarta, 2020

Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta adalah lembaga yang dibentuk pada tahun 2017 sesuai dengan Instruksi Gubernur Nomor 78 Tahun 2017 tentang Percepatan Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta. BPAD merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada sub bidang pengelolaan aset, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, BPAD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Keuangan.

Semenjak berdirinya BPAD tahun 2017 untuk mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah, langsung di dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan aset yang data tidak sesuai antara data dan aset yang ada di SKPD/UKPD dan menyebabkan tidak diterimanya data aset oleh BPK RI.

BPAD Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan perbaikan dari penguatan SDM, menjalankan Sistem, penataan Data Aset, dengan fasilitas seadaya. BPAD

terus berjuang pada Tahun 2018 dihadapkan dengan pemeriksaan BPK yaitu menguji hasil kerja LK di Tahun 2017 yang di berikannya WTP yang sudah 4 tahun berturut-turut Provinsi DKI Jakarta mendapatkan wajar dengan pengecualian (WDP). Pada saat tahun 2018 BPAD terus melakukan perbaikan data dan pengamanan aset, mulai dari pengembangan sistem Sensus, Rekonsiliasi, Penghapusan, BrandGang, KDO, Bank Data, Disposisi, Scan Dokumen Aset, Memperbaharui peralatan kerja, rekrutmen tenaga ahli, sehingga pada Tahun 2019 kembali BPAD menguji hasil kerja Provinsi DKI Jakarta dan BPK memberikan wajar tanpa pengecualian (WTP) yang kedua kalinya kepada Provinsi DKI Jakarta. Berikut merupakan struktur organisasi BPAD Provinsi DKI Jakarta **Gambar 4.3.**



Gambar 4.3 Struktur Organisasi BPAD

Sumber : BPAD Provinsi DKI Jakarta, 2020

Tugas dan Pokok Fungsi (Tupoksi) yang dijalankan oleh BPAD Provinsi DKI Jakarta antara lain :

a. Tugas :

BPAD mempunyai tugas pengelolaan aset daerah.

b. Fungsi :

1. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran BPAD;
2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran BPAD;
3. Penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pengelolaan aset dan penyusunan harga satuan biaya barang;
4. Penyusunan daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD);
5. Pelaksanaan konsultasi teknis terkait harga satuan biaya barang dan pengendalian aset kepada SKPD/UKPD;
6. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penerimaan aset yang berasal dari hibah/bantuan;
7. Penerimaan aset dan pemenuhan kewajiban atas persetujuan prinsip perjanjian dan kontribusi tambahan lain-lain;
8. Pelaksanaan proses penetapan status penggunaan aset;
9. Pembinaan dan pengembangan pejabat fungsional aset;
10. Pengoordinasian dan pelaksanaan proses pemanfaatan aset;
11. Pengendalian hasil penjualan aset;
12. Pelaksanaan penagihan piutang daerah atas pemanfaatan aset;
13. Pengoordinasian pengamanan aset pada satuan kerja perangkat desa (SKPD)/unit kerja perangkat desa (UKPD);
14. Pengamanan aset yang berada pada pengelolaan barang;
15. Pengoordinasian penilaian aset;
16. Pelaksanaan proses perubahan status barang milik/dikuasai daerah;
17. Pengoordinasian dan pelaksanaan penatausahaan aset;
18. Pengoordinasian penyusunan laporan aset;
19. Pengelolaan data dan informasi aset daerah;
20. Pelaksanaan penghimpunan atas pencatatan aset yang dilakukan SKPD/UKPD;
21. Pengoordinasian pengelolaan aset yang tidak dalam penggunaan dan/atau tidak tercatat dalam neraca SKPD/UKPD tertentu;

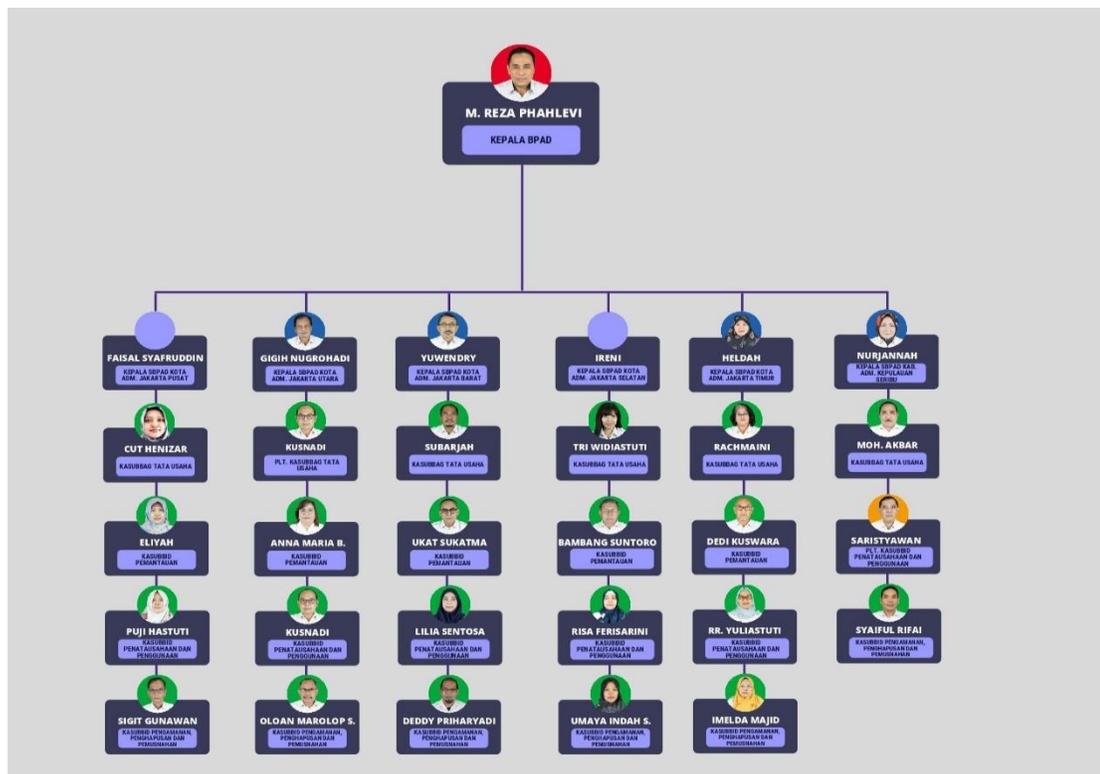
22. Pengadaan, penatausahaan, penyimpanan, pendistribusian dan penghapusan aset yang tidak diserahkan pada SKPD/UKPD;
23. Pengeloan kepegawaian, keuangan, dan barang BPAD;
24. Pengeloan kearsipan, data, informasi dan dokumentasi aset; dan
25. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi BPAD

4.2.1 Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Timur

Kantor Dispenda Kota Jakarta Timur, provinsi DKI Jakarta, bertanggung jawab dalam urusan pendapatan daerah berdasarkan azas otonomi dan pembantuan. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) memiliki tugas dan fungsi lainnya dengan tugas utama yaitu sebagai penyelenggara pemungutan pendapatan daerah wilayah kerjanya dan sebagai koordinator instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga evaluasi pemungutan pendapatan daerah. Dispenda memiliki fungsi merumuskan kebijakan bidang pendapatan daerah, pelaporan atas pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi dan penerimaan daerah lainnya, pemungutan pendapatan daerah, penyuluhan pajak, pemberian izin bidang pendapatan daerah, penyusunan rencana pendapatan daerah, hingga evaluasi pendapatan daerahnya. Kota Administrasi Jakarta Timur sudah menerapkan sistem pelaporan pajak daerah.

Beberapa sumber pendapatan daerah yang menjadi tanggung jawab Dispenda antara lain pengawasan penerimaan pajak baik pajak rumah bagunanan, tanah, kendaraan motor dan mobil, PBB perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB), pajak parkir mobil dan motor di wilayahnya. Terkait dengan hal itu, Dispenda memiliki wewenang untuk menerbitkan izin-izin tertentu sesuai dengan fungsi dan tugasnya seperti surat izin pembangunan dan pengadaan billboard, izin pengadaan lahan parkir, izin reklame, dan lainnya. Informasi lain terkait Dispenda, dapat diakses melalui sistem informasi secara online maupun offline dengan kantor bersama samsat Jakarta Timur lantai 4 Suku Badan Pendapatan Daerah. Akses website <https://bprd.jakarta.go.id/> dan email bapenda.subantimur@jakarta.go.id. Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta memiliki tugas

pengelolaan aset daerah secara struktural yang kemudian dibagi secara pelaksana teknis suku badan pengelolaan aset daerah lima wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Berikut struktur organisasi Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta.



Gambar 4.4 Struktur Organisasi Suku Badan

Sumber : BPAD Provinsi DKI Jakarta, 2020

4.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Mengamankan Aset

Tugas dan Pokok Fungsi (Tupoksi) yang dijalankan oleh Suku Badan Pengelolaan Aset Kota Administrasi Jakarta Timur antara lain :

c. Tugas :

Pengelolaan aset daerah Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Desa (UKPD).

d. Fungsi :

- 1) Pelaksanaan konsultasi teknis terkait harga satuan biaya barang dan pengendalian aset kepada SKPD/UKPD;
- 2) Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penerimaan aset yang berasal dari hibah/bantuan;
- 3) Penerimaan aset dan pemenuhan kewajiban atas persetujuan prinsip perjanjian dan kontribusi tambahan lain-lain;
- 4) Pengoordinasian pengamanan aset pada satuan kerja perangkat desa (SKPD)/unit kerja perangkat desa (UKPD);
- 5) Pengamanan aset yang berada pada pengelolaan barang pada satuan kerja perangkat desa (SKPD)/unit kerja perangkat desa (UKPD);
- 6) Pelaksanaan penghimpunan atas pencatatan aset yang dilakukan SKPD/UKPD;
- 7) Pengoordinasian pengelolaan aset yang tidak dalam penggunaan dan/atau tidak tercatat dalam neraca SKPD/UKPD tertentu;
- 8) Pengadaan, penatausahaan, penyimpanan, pendistribusian dan penghapusan aset yang tidak diserahkan pada SKPD/UKPD;
- 9) Pengelolaan kearsipan, data, informasi dan dokumentasi aset; dan
- 10) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat desa (SKPD)/unit kerja perangkat desa (UKPD);

e. Contoh pengamanan aset daerah

Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Jakarta Timur, mengamankan aset tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (24/03/2021). Pengamanan fisik aset berupa tanah tersebut seluas kurang lebih 500 m² didampingi oleh perwakilan dari Camat Cakung, Lurah Jatinegara, Suku Dinas Sumber Daya Air, UPK PPUKMP Pulogadung, LMK, hingga Satpol PP.

Aset tanah yang bertempat di Gang APP 2 Jl. Swadaya/Jl. Dr. Rajiman, Kampung Rawa Badung RT 003 RW 13 Kelurahan Jatinegara,

Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, merupakan aset UPK PPUKMP Pulogadung, dengan bukti Sertifikat HPL No. 11/Jatinegara Tahun 1997 (dengan total luas 40.605 m²), yang kemudian dimanfaatkan warga tanpa izin. Lebih lanjut Suban PAD Jakarta Timur telah berkoordinasi untuk melakukan pengamanan atas aset tanah tersebut, pasca musibah kebakaran yang melanda pada beberapa waktu lalu, Pengamanan dilakukan dengan melakukan pemasangan garis polisi, pagar hingga papan pengumuman agar tidak kembali dimanfaatkan warga tanpa izin.

SUBAN PAD JAKARTA TIMUR AMANKAN ASET TANAH DI WILAYAHNYA



Gambar 4.5. Pengamanan Aset Daerah

Sumber BPAD Provinsi DKI Jakarta, 2022

f. Aset di wilayah kota Administrasi Jakarta Timur

Pengelolaan keuangan daerah setiap tahun dua kali akan dilakukan pemeriksaan oleh BPK selaku auditor ekstern pemerintah. Dalam melakukan kegiatan audit laporan keuangan pemerintah daerah, BPK akan melakukan audit hingga ke tingkat SKPD, guna melihat kewajaran penyajian laporan keuangan SKPD. Permasalahan pengelolaan aset daerah hampir menjadi faktor penyebab terganjalnya pemberian opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) atas hasil audit

laporan keuangan oleh BPK. Demikian juga halnya dengan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta, provinsi dengan APBD terbesar dan memiliki nilai aset tetap terbesar dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Perubahan opini BPK yang diperoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama 5 tahun terakhir, salah satu catatan penting penyebabnya adalah masalah pengelolaan atau manajemen aset tetap yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah DKI Jakarta, meskipun selama beberapa tahun terakhir pengelolaan aset tetap sudah mulai mengalami perbaikan. Perhatian dan upaya yang maksimal sangat diperlukan untuk membenahi pengelolaan aset tetap, mengingat besarnya jumlah nilai aset tetap yang harus dikelola. Tabel 1 memperlihatkan jumlah nilai aset tetap Pemprov DKI Jakarta dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta tahun untuk wilayah Kota Jakarta Timur 2017 sampai tahun 2021.

Tahun	Jumlah Aset Tetap (Rp)	aset tetap Akumulasi	Provinsi DKI Jakarta Penyusutan (Rp)	Jumlah Aset Tetap (Rp)
2017	91.07	triliun	-	91.07 triliun
2018	92.28	triliun	-	92.28 triliun
2019	92.88	triliun	-	92.88 triliun
2020	93.98	triliun	-	93.98 triliun
2021	94.58	triliun	(Rp.907.000.000)	94.58 triliun

Sumber : Laporan hasil pemeriksaan BPK tahun 2017-2021

Kesemua aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta dicatat didalam Kartu Inventaris Barang (KIB) dan juga laporan-laporan BMD lainnya sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016. Aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah diperoleh dari APBD, hibah atau sumbangan dari masyarakat, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap atau barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah. Perkembangan jumlah total aset tetap setiap tahun di Provinsi DKI Jakarta naik setiap tahunnya, khususnya di tahun 2018 Pemda Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan akuntansi basis aktual sehingga di tahun ini mulai menghitung penyusutan atas aset tetap. menerapkan akuntansi basis akrual sehingga di tahun ini mulai menghitung penyusutan atas aset tetap.

g. Aset Bermasalah di wilayah kota Administrasi Jakarta Timur

Tabel. 4.2 Data Aset Bermasalah

IDENTIFIKASI ASET BERMASALAH		PERMASALAHAN			
DAFTAR ASET BERMASALAH	SKPD/UKPD		PROSES PENERTIBAN	PENGUASAAN FISIK	PASANG PLANG
Jl. Mini 3 Kel. Bambu Apus, Kec. Cipayung	KELURAHAN BAMBU APUS	Digugat kembali oleh warga	Pagar depan saja	dikuasai RSUD Cipayung	Sudah
Jl. Cipinang Muara III Rt. 09/015	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	Diklaim sebagian oleh Hj. Eliya Kurniawati di Pengadilan Negeri		Dinas Pemuda dan Olah Raga	-
Jl. Jatinegara Timur Kel. Rawabunga Kec. Jatinegara (RS. Mitra)	DINAS PENDIDIKAN	Dipergunakan masyarakat untuk parkir liar dan dibangun ruang Serbaguna	-	Dipergunakan masyarakat untuk parkir liar dan lain-lain	-
Kel. Bidara Cina (Sudetan Kali Ciliwung)	SUDIN PU AIR	Dikuasai masyarakat	-	Dikuasai masyarakat	-

Jl. Raya Bekasi KM 17 Rt. 013/005 Kel. Jatinegara Kaum	ASET EKS BPIPM (KER- JASAMA)	Masyarakat untuk parkir Truck/Trailer	Berhenti karena Pemda di laporkan ke polisi	Masyarakat untuk parkir Truck/Trailer	Sudah
JL. Nusa I Kel. Kramat Jati	KELURAHAN KRAMAT JATI	Di duduki masyara- kat & di klaim tanah Kodam	Inventarisasi Penghuni	Masyarakat peda- gang	-
Jl. SMPN 126 Kel. Batu Ampar, Kec. Kramat Jati (Tanah kosong)	-	Dibangun Pemancingan, area Pedagang dan Bangunan Per- manen(RM)	Sudah dipagar	Sebagian telah dibangun RPTRA	Sudah
Jl. Raya Dr. KRT. Radjiman Widyodiningrat Rw 06 dan Rw 07 Kel. Jatinegara, Kec. Cakung (Kampung Rawa Badung)	DINAS TATA AIR	Di kuasai masyara- kat	Sudah dipasang pagar oleh Sudin SDA JT	Sebagian dikuasai masyarakat	Sudah dipasang plang di 2 titik
Jl. Mangga, Kel. Batu Ampar Kec. Kramat Jati	DINAS OLAH RAGA	Di kuasai masyara- kat untuk pemancingan	SP 1, SP2 DAN SP 3	Dikuasai sebagian oleh masyarakat	Sudah
RT. 001 RW. 002 Kel. Cakung Bar- at Kec. Cakung Jakarta Timur	-	Di kuasai masyara- kat	Inventarisasi Penghuni	Dikuasai masyara- kat	-
Jl. Cilangkap Raya Rt. 005/004	-	Di kuasai masyara- kat	-	Masyarakat	-

Jl. Pengarengan Pulogadung Jakarta Timur	DINAS OLAH RAGA	Di kuasai masyarakat	Inventarisasi Penghuni	Dikuasai masyarakat	-
Jl. Bambu Kuning Rt. 012/002 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Cipayung	DINAS KELAUTAN, PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Gugatan di Pengadilan 2.430 m2	Peninjauan Kembali (Novum baru)	Pemda DKI Jakarta	-
SKKT Kel. Klender	KELURAHAN KLENDER	Dikuasai penghuni liar	Himbauan kepada penghuni	Penghuni Liar	-
Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung	UPK PPUMKMP Pulogadung	Bangunan liar dan dijadikan agunan oleh PT Cakra	Proses Pengakhiran KSO	Dikuasai masyarakat 7 sd 8 Ha	Sudah 5 plang
Waduk Rorotan Jl. Kayu Tinggi / Tambun Rengas Kel. Cakung Timur Kec. Cakung	DINAS TATA AIR	Fasum PT Mitra Makmur S (blm ditata)	-	Pemda DKI Jakarta	Sudah
TPU Pondok Kelapa	DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN	Ada gugatan	Sosialisasi	Sebagian dikuasai masyarakat	-

SMAN 71 Jl. Kav. TNI AL Kel. Duren Sawit Kec. Duren Sawit	DINAS PEN- DIDIKAN	Sebagian dikuasai pegawai DisDik, +- 10 kk	Inventarisasi Penghuni	Sebagian dikuasai masyarakat	Sudah
Situ Rawa Babon Jl. PKP Ke- lurahan Kelapa Dua Wetan	DINAS TATA AIR	Klaim Masyarakat atas nama bapak jamal	Klaim Masyarakat	Pemda DKI Jakar- ta,sudin sda jt	Sudah
Jl. Kayu Mas Tengah IX Ke- lurahan Puloga- dung Kecamatan Pulogadung Ja- karta Timur	BELUM ADA	Di klaim Masyarakat	Klaim Masyarakat	-	Sudah
Jl. Assyafiiyah Kelurahan Cilangkap Keca- matan Cipayung Jakarta Timur	DINAS SO- SIAL	Terdapat klaim masyarakat 500 m ² atas lokasi tersebut	sudah dipasang pagar dan papan plang	dikuasai oleh dinas sosial	Sudah
Jl. Pulo Kambing Kawasan Industri Pulogadung akar- ta Timur	BPAD		-	PT. JIEP	-
Jl. Pulo Lentut Kawasan Industri Pulogadung Ke- lurahan Jatinegara	BPAD		-	38	

PT. Nabati		Lahan tdk digunakan lagi		PT. NABATI	
Kelurahan Rawa Teratai, Kec. Pulogadung (dekat RPH Unggas)		terdapat pemancingan warga	peninjauan lapangan		-
Kelurahan Rawa Teratai, Kec. Pulogadung (dekat RPH Unggas)		terdapat kandang kambing dan sapi	peninjauan lapangan		-
Kesmaved		Digugat oleh RE Barimbing seluas 2400 m2, akan disiapkan novum baru. Dikuasai warga (Madura) ± 20.000 m ²			
SMPN14 Bali Mester (eks SDN)	Suku Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur	di kuasai warga, dan lsm	sudah dipagar	lsm dan sekolah yake	
Eks Kantor Kelurahan Cililitan, Jl. Bersama Mayjen Sutoyo Cililitan Kec. Kramat Jati Jakarta Timur		Tidak tercatat di aset Pemda. Fisik dikuasai oleh ahli waris Habib, penggunaan untuk majlis ta'lim. Tetapi banyak yg klaim bu juhairiyah, antong, dan keluarga habib berdasarkan Girik C.181. Tahun 2014 sudah pernah berperkara dipengadilan. Fisik sudah di pager. Aset tidak masuk di KIB A cililitan		majlis ta'lim daarul ihsan	tidak ada papan plang

Jl.Raya Bogor RT.007/RW.011, Kramat Jati, Kramat Jati, Ja- karta Timur. Lapangan Bola Kramat Jati/Hex	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	Bidang tanah digugat di PN Timur oleh Mulya Rosana dengan dasar Verponding No. 5826/62 an. Wan Achmad dan telah putus PK, Pemda kalah dan telah dieksekusi	Proses banding oleh Biro Hukum		
.Jl. Raya Bekasi KM 17 Rt. 013/005, Kel. Jatinegara Kaum	eks bpipm	digugat oleh sdr toyo martoyo		dilapangan dikuasai oleh ambon	papan plang bareskrim
Kel. Bidara Cina (Sudetan Kali Ciliwung)	Kelurahan Bi- dara Cina	digugat warga		Dikuasai masyara- kat	
RT.06, 05 dan 02, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakar- ta Timur. Tempat Pemakaman Umum (TPU)	Dinas Per- tamanan dan Pemakaman	PU seluas ± 15,89 Ha yang berlokasi di RW.06, 05,02 Ke- lurahan Cipinang Besar Selatan, keca- matan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur yang selama ini dikelola oleh Dinas Pemaka- man Provinsi DKI Jakarta namun tanahnya masih men- jadi aset Yayasan. belum dibebas- kan/dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta			

<p>Jl. Cibubur I RT. 002 RW. 012 Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur. SDN 11 Cibubur</p>	<p>SDN 11 Cibubur (Suku Dinas Pendidikan 2)</p>	<p>pada tanggal 25 Juli 1981 dibebaskan seluas 7.719 m² dan pada tahun 1993 dibangun Sekolah dan pernah dilakukan rehab pada tahun 2011. Nyonya Rani Khemplani menggugat sebagian lahan seluas 1.490 m² dengan SHM No. 24 diperoleh dari proses lelang dengan Risalah No. 6941993</p>			
<p>Jl. Tipar Kav. DKI Duren Sawit, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. SDN Pondok Kelapa 01 Pagi Duren Sawit</p>					
<p>Jalan Raya Bekasi Timur, Cipinang, Pulogadung, Jakarta Timur.</p>		<p>Permohonan dukungan sepenuhnya atas permasalahan bidang tanah seluas ± 32.502 m² yang terletak di Jl. Raya Bekasi Timur, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur</p>			
<p>Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur.</p>	<p>SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA (DOUBLE CATATA DENGAN KELURAHAN BATU AMPAR SELUAH 15.000 M²)</p>	<p>Klaim ahli waris Perin bin Pirun berupa girik C No.556 persil 16 S I atas nama Perin bin Pirun</p>	<p>sudah dilakukan peninjauan dan pengelola bersedia :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bersedia meninggalkan lokasi lahan jika lokasi tersebut akan digunakan oleh Pemda 2. bersedia mengadakan PKS dengan Pemda 		

<p>Jalan tipar Kampung Gapura Muka/Kampung Baru, Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur.</p>	<p>satpol pp</p>	<p>Klaim almarhum Amar bin H.Merin atas sebidang tanah seluas 18.730 m² yang terletak di Jalan Tipar Kampung Muka/Kampung Baru, Kelurahan Cakung Barat, kecamatan Cakung berdasarkan Girik C. No : 551 Persil 16 S III tahun 1960 yang ditempati oleh Tran-tib DKI Jakarta</p>			
<p>Jl.Bina Marga, Ceger, Cipayung, Jakarta Timur. Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2</p>	<p>Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2</p>	<p>Bidang tanah tersebut di klaim Aloy G. Samosir kuasa Man-ul Hamani dengan dasar kepemilikan Girik C.239 persil 74 C, terdapat papan plang dari Aloy G. Samosir</p>			
<p>Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo</p>	<p>sudin kesehatan JT</p>	<p>di klaim oleh Santi Yulia dengan dasar Girik C 19 persil 28 ke RSUD Pasar Rebo</p>			
<p>Jl.Kayu Mas tengah IX-Kavling POLRI, Pulogadung, Pulogadung, Jakarta Timur.</p>		<p>Bidang tanah di klaim ahli waris Alm. Toni Sihombing dan pernah ada pembahasan di Biro Hukum tanggal 1 Agustus 2013</p>			
<p>Pondok Kelapa, Jatinegara, Jakarta Timur. TPU</p>	<p>Dinas Per-tamanan dan Pemakaman</p>	<p>TPU di klaimoleh H.Mat Sohe, Bah-rudin Encit dan Asan Kajan dengan girik C 1545, C 1543 dan C 1547,</p>			

Pulogebug, Cakung, Jakarta Timur. Jalan dan jembatan sentra primer ke Pulogebug sampai Bojong Rangkong	Dinas Bina Marga	Klaim bidang tanah jalan oleh Kendar Ali berdasarkan Akta Jual Beli No.377/12/1983 tanggal 12 Januari 1983			
Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur. Tanah Kosong	DINAS SOSIAL	Bidang tanah di klaim H.Mairan bin Naasan dengan dasar Girik C 490			
Jl.Kumbang, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur. SDN 01 Cililitan	Dinas pendidikan	Bidang tanah milik Pemda DKI Jakarta yang telah bersertifikat SHP 089 tahun 2011 saat ini berdiri bangunan SDN 01 Cililitan di klaim ahli waris Matani Rizal dengan dasar Girik 337 persil 2 blok II D an. Masan bin Entong			
Kampung Pangarengan RT.010/RW.06, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur. GOR MINI		Bidang tanah aset Pemprov DKI Jakarta di klaim dengan Girik C 1282 an.R.Jasin bin R.Djamberi			
Kampung Pulo Jahe RT.006/RW.101, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur. SDN 02, SDN 01, SDN 11	DINAS PENDIDIKAN	bidang Tanah aset Pemda di klaim ahli waris Usen bin Saman dengan dasar Girik			
Rumah Dinas Lurah Kampung Melayu	kel kampung melayu	Dikuasai oleh Pensiunan PNS Kelurahan Kampung Melayu			

Jl Balai Pustaka Baru		Tanah kosong di Komplek Rumah Dinas Lurah/Camat di Kecamatan Plogadung seluas 1.907 m ²			
SDN 01 Kelurahan Bambu Apus	Sudin Pendidikan II	Diklaim masyarakat Panjang Bin Simin, sudah dipasang papan plang oleh penggugat	Kasasi di Pengadilan		

Sumber: dari bidang pengamanan, penghapusan dan pemagaran

Sesuai dengan Surat Edaran Walikota Administrasi Jakarta Timur Tentang Pengamanan dan Usulan Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 12 bahwa Kepala PD/UPD selaku Pengguna Barang mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, dengan ini diminta kepada Saudara untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut

1. Menginventarisir dan mengamankan lahan-lahan aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tercatat dalam KIB serta lahan yang dikuasa oleh pihak lain.
2. Menginventarisir lahan-lahan yang membutuhkan papan plang, pemagaran serta pensertifikatan untuk segera dikirim ke Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur paling lambat tanggal 25 Februari 2021
3. Menginventarisir Barang Inventaris Kantor dan Peralatan Lainnya yang tercatat pada KIB B untuk dilakukan usulan penghapusan Tahap Pertama paling lambat tanggal 31 Maret 2021 dan Tahap Kedua paling lambat tanggal 30 September 2021 untuk segera dikirim ke Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur

4. Menginventarisir dan melaporkan lahan-lahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang belum tercatat dalam KIB A PD/UPD.

Dengan ini Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur melakukan pengamanAset dengan Jumlah SKPD/UKPD yang terdampak sebanyak 50 SKPD/UKPD, dari 50 SKPD/UKPD yang terdampak pengamanan aset yang sudah di selesaikan 10 SKPD/UKPD sementara yang belum di selesaikan masih dalam tahap proses penyelesaian.

4.2.3 Faktor Pendukung Pengelolaan Aset Daerah

Penerapan Sistem Informasi Manajemen dalam proses penyelenggaraan pemerintahan pengelolaan aset Kota Administrasi Jakarta Timur berbasis SIERA tentu akan memerlukan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan Sistem Manajemen Daerah (SIMDA) di Kota Jakarta Timur. Penggunaan sistem pelaporan berbasis SIM mendukung di dalam pelaporan pengelolaan aset daerah secara cepat, memudahkan sistem pelaporan aset dapat di lakukan dimana dan kapan saja sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) untuk sistem pelaporan berbasis integrasi, transparan dan akuntabel, sehingga perlu adanya peningkatan *softskill* serta kualitas sumber daya manusia (SDM) berbasis kompetensi untuk meningkatkan kapasitas didalam proses penginputan data, pengelolaan, manajemen database Wilayah kota administrasi Jakarta Timur yang terdiri dari 10 Kecamatan terbagi menjadi 65 Kelurahan.

Menurut Sutabri (2012), sistem informasi dapat mendukung fungsi operasional, manajemen, dan proses pengambilan keputusan suatu organisasi maka diperlukan sarana prasarana berupa perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) serta jaringan koneksi internet. Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan program pengelolaan aset. Tersedianya infrastruktur seperti server, jaringan internet, personal komputer, laptop,

serta fasilitas penunjang lainnya cukup kuat dalam mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu program.

4.2.4 Faktor Penghambat Pengelolaan Aset Daerah

Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta juga mengamanatkan agar saling berkoordinasi dan terus memonitor wilayah di daerahnya serta segera laporkan apabila terdapat yang penyalahgunaan fasos dan fasum serta fasilitas umumnya yang dijadikan komoditi bagi pihak swasta ataupun perorangan yang seharusnya bisa menjadi pemasukan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

4.2.5 Efektivitas Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah

Efektivitas suku Badan pengelolaan aset daerah sebagai sektor pengelolaan aset daerah Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Desa (UKPD). Bertanggung jawab dalam urusan pendapatan daerah berdasarkan azas otonomi dan pembantuan, berlandaskan dengan permendagri No.19 tahun 2019 mengenai Pedoman pengelolaan BMD dan instruksi Gubernur Provinsi. DKI Jakarta No.142 tahun 2016 mengenai Pengamanan Aset milik pemerintah provinsi DKI Jakarta. Pengamanan Aset terbagi menjadi 3 antara lain pengamanan aset fisik, pengamanan aset administrasi dan pengamanan aset hukum. Pengamanan aset salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan aset/ barang milik daerah yaitu landasan hukum pengelolaan harus dioperasionalkan (Yusuf, 2008)

Efektivitas suku badan pengelolaan aset daerah Kota Administrasi Jakarta Timur dalam mengamankan aset juga melakukan perencanaan baik dalam segi anggaran, maupun segi pelaksanaan. Adapun proses saat pelaksanaan pengamanan melakukan tahapan mulai dari berkoordinasi dengan suku dinas cipta karya tata ruang dan pertanahan Jakarta timur, suku badan pelayanan pengadaan barang/jasa Jakarta Timur, Suku dinas cipta karya tata ruang dan pertanahan selaku tim perencanaan saat pengamanan asset, suku badan pelayanan pengadaan barang/jasa Jakarta timur selaku

pengadaan pihak ke III untuk mengamankan asset. Efektivitas pengelolaan aset daerah sudah terintegrasi dengan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) tujuannya memberikan pelayanan yang akuntabel dan transparan. Menurut Mardiasmo (2004:241) bahwa pengamanan aset daerah merupakan salah satu sasaran strategis yang harus dicapai dalam kebijakan pengelolaan aset daerah.

4.2.5.1. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki visi sebagai Auditor Presiden yang responsif, interaktif dan terpercaya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas dalam mentransformasikan manajemen pemerintahan yang baik dan bersih serta sesuai amanat PP 60 tahun 2008 pasal 59 ayat (2) dan Inpres Nomor 4 Tahun 2011, BPKP, dalam hal ini Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, memandang perlu untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan aparatnya menghadapi perubahan, mendorong pelaksanaan tata kelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel. Hal ini penting guna meningkatkan kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah menuju terwujudnya *good governance*. Sejalan dengan RPJM Tahun 2010-2014, dalam Renstra Tahun 2010-2014, Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah telah menetapkan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah sebagai kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja "*Meningkatnya Tingkat Opini BPK terhadap LKPD*".

Untuk mendukung tujuan tersebut, sejak tahun 2003, Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah membentuk Satuan Tugas Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) , dengan tugas:

- 1) Mengembangkan/membuat dan melakukan pemutakhiran Program Aplikasi Komputer SIMDA yang berkaitan dengan pembangunan / peningkatan kapasitas pemerintah daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

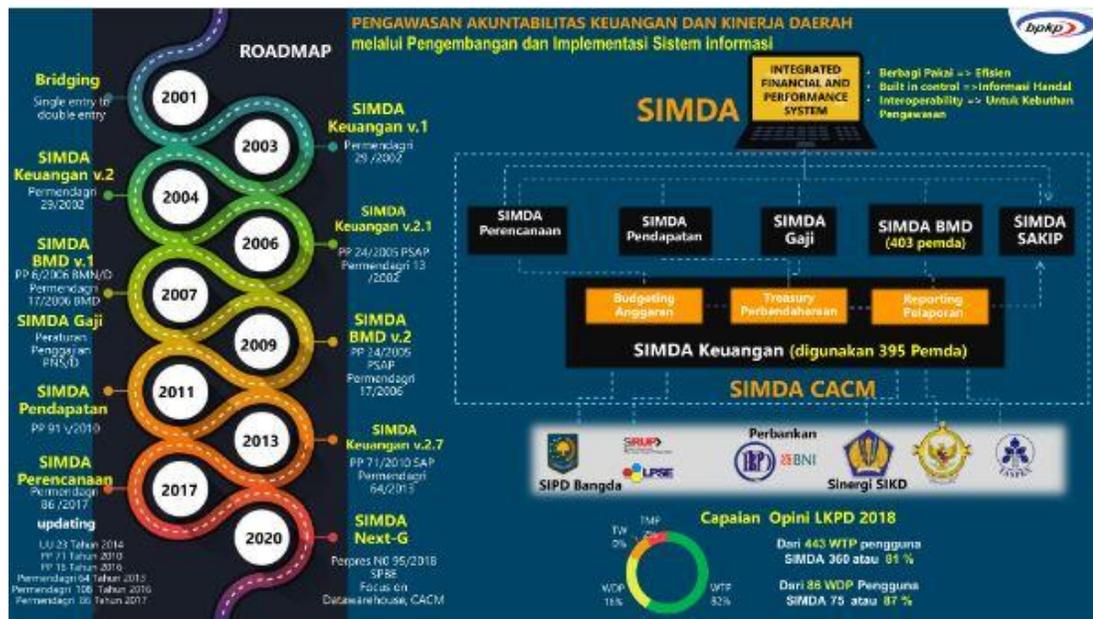
berlaku atau dalam rangka pemenuhan kebutuhan manajemen daerah, mengarah ke grand design *Data Base Management System (DBMS)* .

- 2) Memberikan bimbingan teknik / pelatihan kepada Satgas SIMDA Perwakilan BPKP yang akan ditugaskan dalam asistensi/implementasi Program Aplikasi Komputer SIMDA.
- 3) Membantu Satgas SIMDA Perwakilan BPKP melakukan asistensi implementasi Program Aplikasi Komputer SIMDA pada pemerintah daerah.

Tujuan pengembangan Program Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah ini adalah:

- 1) Menyediakan Data base mengenai kondisi di daerah yang terpadu baik dari aspek keuangan, aset daerah, kepegawaian/aparatur daerah maupun pelayanan publik yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja instansi pemerintah daerah.
- 2) Menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah. Informasi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan.
- 3) Mempersiapkan aparat daerah untuk mencapai tingkat penguasaan dan pendayagunaan teknologi informasi yang lebih baik.
- 4) Memperkuat basis pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Program Aplikasi SIMDA telah diimplementasikan pada 425 Pemda dari 542 pemerintah daerah yang ada atau sebanyak 78,41%..



Gambar 4.5 Sistem alur BPKP

4.2.6 SIERA (Sistem Informasi Elektronik Rekonsiliasi Aset)

Pengelolaan aset daerah kota administrasi Jakarta Timur memiliki sistem informasi inventarisasi elektronik dan rekonsiliasi aset barang milik daerah yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Aset Daerah yang terintegrasi, transparan dan akuntabel melalui sistem informasi elektronik rekonsiliasi aset yaitu SIERA yang dapat diakses melalui website <https://aset.jakarta.go.id/siera/>. Aplikasi yang memudahkan serta memberikan informasi di era digital dalam inventarisasi, rekonsiliasi aset barang milik daerah secara integrasi, transparan dan akuntabel memberikan manfaat secara cepat dalam pengambilan keputusan. Siera merupakan aplikasi rekonsiliasi aset pemerintah Provinsi DKI Jakarta berbasis teknologi informasi yang memudahkan sistem pelaporan aset dapat dilakukan kapan saja sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) untuk sistem pelaporan berbasis integrasi, transparan dan akuntabel.

Sistem Informasi Elektronik Rekonsiliasi Aset atau disingkat SIERA merupakan sistem yang dibangun oleh Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD)

Provinsi DKI Jakarta untuk mempermudah pengurusan barang SKPD/UKPD dalam melakukan kegiatan Rekonsiliasi Aset, dimana semua transaksi yang dilakukan antar SKPD/UKPD sudah melalui sistem yang tidak dilakukan secara manual, dengan adanya sistem SIERA dapat meminimalisir kesalahan terhadap perhitungan nilai aset barang. Berikut merupakan fitur sistem informasi elektronik rekonsiliasi aset (SIERA) untuk memudahkan didalam pelaporan secara integrasi, transparan, akuntabel, di era digitalisasi **Gambar 4.6.**



Gambar 4.6 Aplikasi SIERA

Sumber : siera.jakarta.go.id

Fitur-fitur sistem informasi pengelolaan aset daerah dibuat dengan tujuan mempermudah memperoleh info rekonsiliasi aset Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta yang terintegrasi suku badan pendapatan daerah, berikut fitur pelayanan Siera pada



Gambar 4.7 Fitur Pelayanan SIERA Provinsi DKI Jakarta

4.3 Analisis

4.3.1 Komunikasi

Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan sbaik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group). Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distori atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah sesungguhnya

Sistem komunikasi dan kordinasi yang dilakukan oleh suku badan pengelolaan aset administrasi Jakarta Timur dengan Provinsi DKI Jakarta secara struktural, fungsional sudah efektif terlihat dari strutur organisasi dan tata kelola sesuai dengan Kepala Sub Bagian mengamankan aset berlandaskan Peraturan Gebuner DKI Jakarta No 142 tahun 2016 mengenai pengamanan aset milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun

2019 mengenai pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah yang dikelola oleh BPAD Provinsi DKI Jakarta dan pelaksana teknis oleh suku badan pengelolaan aset administrasi Jakarta Timur. Pengelolaan aset daerah yang sudah baik dengan sistem komunikasi dan kordinasi yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah (SBPAD) lima kota dan satu kabupaten berbasis digitalisasi yaitu penerapan Sistem Informasi Elektronik Rekonsiliasi Aset (SIERA) untuk mempermudah didalam mengakses informasi secara transparan, akuntabel dan terintegrasi dengan melaksanakan Tugas, Pokok Fungsi (Tupoksi) pengelolaan aset daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) atau Unit Kerja Perangkat Desa (UKPD), serta melakukan kordinasi dan pelaporan ke BPAD Provinsi DKI Jakarta secara berkala, namun masih mengalami beberapa kendala ketika pengimplementasian pelaporan yang disebabkan oleh faktor non teknis (sistem jaringan informasi) mengalami gangguan selain itu perlu ditingkatkannya sumber daya manusia yang berkaitan dengan *softskill*.

4.3.2 Sumber Daya

Sumberdaya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Kurangnya profesionalitas antar aparatur negara sipil (PNS) di tingkat Kelurahan dan Kecamatan. Sebagai contoh pada saat melakukan rekonsiliasi, pihak dari kelurahan maupun kecamatan tidak datang tepat waktu untuk mengumpulkan laporan pengelolaan aset milik negara, laporan keuangan, hal tersebut dapat menghambat pembuatan matriks konsolidasi untuk dilaporkan ke Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah (BPKAD). Sistem pelaporan yang kurang cepat berbasis Teknologi Informasi dari sumberdaya manusia, serta kurangnya profesionalitas dengan memperbaiki data aset secara kontinuitas. Kendala lain yang dialami antara lain akses sistem informasi teknologi yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari seperti komputerisasi (software dan hardware) mengalami gangguan dalam koneksi jaringan yang tidak lancar, sering putus, menjadi masalah dalam penyampaian laporan para petugas inventarisasi, penatausahaan, dan pelaporan aset maupun bendahara, sehingga proses penginputan ebku-pun menjadi terhambat.

1.3.3 Disposisi

Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh Implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arah yang telah digariskan dalam guideline program. Komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan.

Penerimaan, Penyimpanan, dan Penyaluran barang merupakan tupoksi dari pengurus barang. Sistem yang memfasilitasi pencocokan laporan nilai BMD (Barang Milik Daerah) antara dua unit pemproses atau lebih terhadap sumber data yang sama dikelola oleh admin SIERA BMD dengan tugas hanya menerima dari pengguna barang, pengguna anggaran, kemudian disimpan di SIERA BMD, lalu disalurkan kepada yang meminta (jika belanja modal sudah memenuhi kebutuhan penunjang pekerjaan), tapi jika belanja yang habis pakai berdasarkan permintaan barang habis seperti Tinta Printer, ATK, pertama dilakukan pengadaan barang, selanjutnya diberi-

kan berita acara serah terima, selanjutnya permintaan barang harus di verifikasi oleh pengguna barang, kemudian di disposisikan ke pengurus barang, jika sudah dikeluarkan oleh pengurus barang maka bisa didistribusikan ke pemohon barang. Penerimaan barang yang berhasil diterima oleh pemohon barang maka total barang yang ada digudang akan ditandai dengan kartu kendali barang.

Kartu kendali barang yang tersimpan dalam SIERA berisi hasil terima nomor barang, tahun barang, CV, PT, nilai, nomor berita acara serah terima, nomor SPK (Surat Perintah Kerja) yang selanjutnya akan muncul di kartu barang (label). Setelah itu barang yang telah dicatat di SIERA akan dikurangi sesuai dengan total barang yang diminta. Barang yang telah diterimapun akan dicatat, Jadi aset daerah atau barang modal tidak mudah dikeluarkan kecuali jika ada disposisi maupun SK dari Walikota dan Kabupaten dibawah naungan suku Badan Aset Daerah Administrasi yang langsung berkordinasi kepada BPAD Provinsi”. (Wawancara pada tanggal 28 Juli 2022)” Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa disposisi, komunikasi dan koordinasi antar pegawai sampai ke pimpinan sangatlah penting, karena dengan disposisi, komunikasi dan koordinasi suatu prosedur akan lebih mudah mencapai tujuan organisasi serta berpengaruh terhadap pengelolaan aset dan barang daerah yang lebih optimal. Sampai saat ini proses pengadaan barang di pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Timur berlangsung cukup baik, disamping itu juga didukung dengan adanya aplikasi SIERA berbasis online, atau di kenal dengan startup 4.0 BPAD Provinsi DKI Jakarta **Gambar 4.8.**



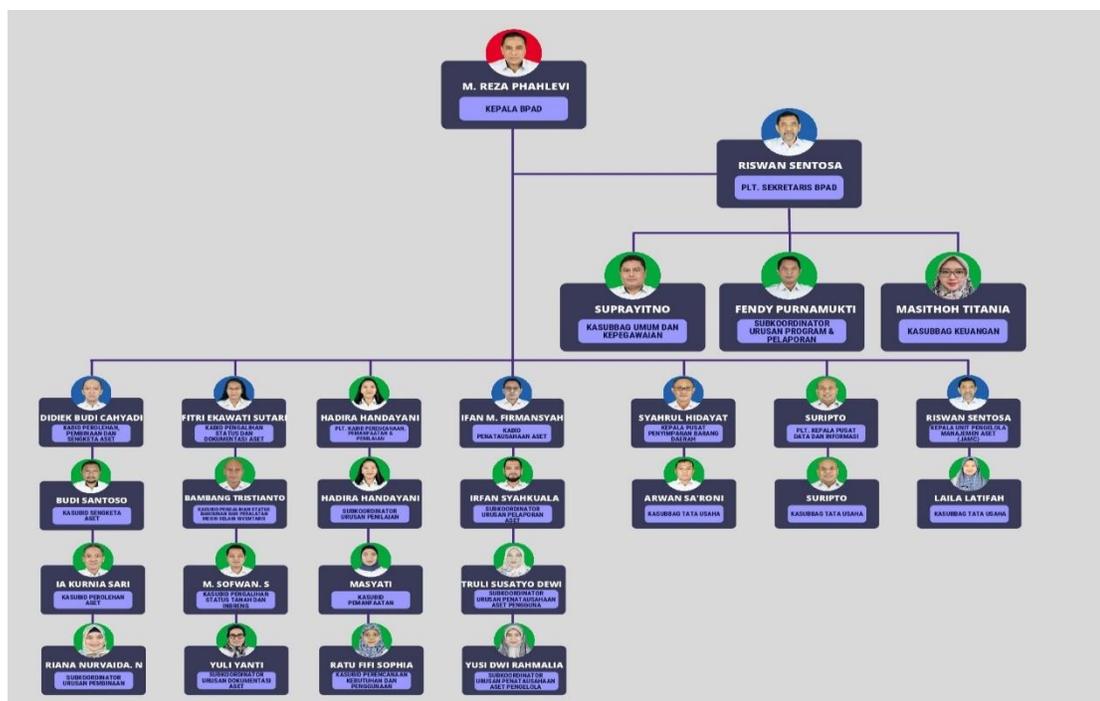
Gambar 4.8 Fitur Startup BPAD DKI Jakarta

1.3.4 Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating prosedur (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementasi. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat

BPAD Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan perbaikan dari penguatan SDM, menjalankan Sistem, penataan Data Aset, dengan fasilitas seadaya. BPAD terus berjuang pada Tahun 2018 dihadapkan dengan pemeriksaan BPK yaitu menguji hasil kerja LK di Tahun 2017 yang di berikannya WTP yang sudah 4 tahun berturut-turut Provinsi DKI Jakarta mendapatkan wajar dengan pengecualian (WDP).

Pada saat tahun 2018 BPAD terus melakukan perbaikan data dan pengamanan aset, mulai dari pengembangan sistem Sensus, Rekonsiliasi, Penghapusan, BrandGang, KDO, Bank Data, Disposisi, Scan Dokumen Aset, Memperbaharui peralatan kerja, rekrutmen tenaga ahli, sehingga pada Tahun 2019 kembali BPAD menguji hasil kerja Provinsi DKI Jakarta dan BPK memberikan wajar tanpa pengecualian (WTP) yang kedua kalinya kepada Provinsi DKI Jakarta. Berikut merupakan struktur organisasi BPAD Provinsi DKI Jakarta **Gambar 4.3**.



Gambar 4.9 Struktur Organisasi BPAD

Sumber : BPAD Provinsi DKI Jakarta, 2020

Tugas dan Pokok Fungsi (Tupoksi) yang dijalankan oleh BPAD Provinsi DKI Jakarta antara lain :

h. Tugas :

BPAD mempunyai tugas pengelolaan aset daerah.

i. Fungsi :

26. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran BPAD;
27. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran BPAD;
28. Penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pengelolaan aset dan penyusunan harga satuan biaya barang;
29. Penyusunan daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD);
30. Pelaksanaan konsultasi teknis terkait harga satuan biaya barang dan pengendalian aset kepada SKPD/UKPD;
31. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penerimaan aset yang berasal dari hibah/bantuan;
32. Penerimaan aset dan pemenuhan kewajiban atas persetujuan prinsip perjanjian dan kontribusi tambahan lain-lain;
33. Pelaksanaan proses penetapan status penggunaan aset;
34. Pembinaan dan pengembangan pejabat fungsional aset;
35. Pengoordinasian dan pelaksanaan proses pemanfaatan aset;
36. Pengendalian hasil penjualan aset;
37. Pelaksanaan penagihan piutang daerah atas pemanfaatan aset;
38. Pengoordinasian pengamanan aset pada satuan kerja perangkat desa (SKPD)/unit kerja perangkat desa (UKPD);
39. Pengamanan aset yang berada pada pengelolaan barang;
40. Pengoordinasian penilaian aset;
41. Pelaksanaan proses perubahan status barang milik/dikuasai daerah;
42. Pengoordinasian dan pelaksanaan penatausahaan aset;
43. Pengoordinasian penyusunan laporan aset;
44. Pengelolaan data dan informasi aset daerah;
45. Pelaksanaan penghimpunan atas pencatatan aset yang dilakukan SKPD/UKPD;
46. Pengoordinasian pengelolaan aset yang tidak dalam penggunaan dan/atau tidak tercatat dalam neraca SKPD/UKPD tertentu;

- 47. Pengadaan, penatausahaan, penyimpanan, pendistribusian dan penghapusan aset yang tidak diserahkan pada SKPD/UKPD;
- 48. Pengeloan kepegawaian, keuangan, dan barang BPAD;
- 49. Pengeloan kearsipan, data, informasi dan dokumentasi aset; dan

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi BPAD

4.3.4 Hasil Analisis Pertanyaan dan Jawaban Responden

No	Kriteria Pertanyaan	Analisis
Stakeholder Pihak (Kepala Suku BPAD Jakarta Timur, Kepala Suku Bidang dan Staff Ahli Pengelola Aset)		
1	Bagaimanakah efektivitas Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya saat mengamankan Aset?	Dukungan Sistem Informasi Manajemen pengelolaan aset (SIERA) memberikan keuntungan dari segi kecepatan dan ketepatan serta pengendalian yang akan berarti terjadi peningkatan efisiensi waktu dan efektivitas kegiatan, namun perlu peningkatan kualitas SDM terhadap manajemen penginputan data pelaporan
2	Apakah Faktor pendukung dan Penghambat dalam efektivitas Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur	Faktor pendukung efektivitas Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah

	dalam mengamankan Aset?	dengan ketersediaan sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan program pengamanan aset. Tersedianya infrastruktur seperti server, jaringan internet, personal komputer, laptop, serta fasilitas penunjang lainnya cukup kuat dalam mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program. Hambatan mulai dari SDM yang belum mengerti perbedaan jenis barang, hingga permasalahan pada barang yang ada di neraca. Salah satu contohnya yang paling banyak terjadi masalah adalah peralatan dan mesin (spesifikasi), seperti ada catatan di neraca tapi barang tidak ada, atau sebaliknya barang ada tapi tidak tercatat di
--	-------------------------	--

		neraca. Perlu adanya regulasi terkait sinkronisasi aset yang ada dengan SIM SIERA BPAD.
3	Bagaimana kebijakan Pengelolaan Aset Daerah Di Kota Administrasi Jakarta Timur Dalam Mengamankan Aset?	Mendukung pengelolaan barang atau aset daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka salah satu cara yang perlu dilakukan pemerintah daerah perlu memiliki dan mengembangkan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan handal sebagai alat untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang disinkronisasi Permendagri No 19 tahun 2019 mengenai Pedoman pengelolaan BMD. Dan instruksi gubernur prov. DKI Jakarta No 142 tahun 2016 mengenai Pengamanan Aset milik pemprov

		DKI Jakarta.
4	Bagaimana proses pengamanan aset pada pa- da saat habis masa Pinjam pakai barang milik daerah? dan siapa saja yang terlibat?	Proses pengamanan aset dan saat habis masa pinjam berdasarkan ijin pemakaian tanah dan belum berdasarkan surat perjanjian pinjam pakai. Pemanfaatan dalam manajemen pengelolaan aset daerah dilakukan oleh Staff BPAD kordinasi dengan SKPD khusus melalui (online maupun offline) yang mengurus pemanfaatan barang, seperti pinjam pakai, kerjasama, pemanfaatan bangun serah guna. Adanya Pemanfaatan aset pemerintah tersebut di samping bertujuan untuk mendayagunakan aset juga dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan daerah dan mengurangi beban anggaran pemeliharaan aset.

5	Bagaimana siklus pengamanan barang milik daerah dimulai dari proses pemagaran hingga pensertifikatan aset daerah?	Pengamanan aset merupakan langkah strategis yang harus dicapai oleh pemerintah daerah dalam kebijakan pengelolaan aset, langkah strategis dengan pengkodean dan pelabelan (scan kode) yang merupakan output database SIM SIERA sesuai Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang masih dapat dipertanggungjawabkan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
6	Bagaimana proses pengawasan dan pengendalian atas pengamanan barang milik daerah?	Proses pengawasan dan pengendalian atas pengamanan barang milik daerah adalah SIM SIERA dalam proses pengendalian adalah pengawasan yang terus-menerus dari prestasi, bukan hanya

		<p>pelaporan periodik saja.</p> <p>Pengendalian dengan sistem barcode,</p> <p>Pengawasan dapat dilakukan berdasarkan model perencanaan, batasan pengendalian, maka suatu berita segera disampaikan pada unit pengendalian yang tepat. maka kegiatan-kegiatan dalam organisasi dapat diawasi secara terus-menerus, penyimpangan akan segera terdeteksi.</p>
7	<p>Bagaimana pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan penangaanan barang milik daerah yang ada pada masing-masing SKPD?</p>	<p>Sistem kordinasi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) atau UKPD dengan komunikasi kordinasi sub bagian Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah sesuai peraturan Kemendagri dan Gubenur Provinsi DKI Jakarta yang sifatnya kordinasi antara BPAD dengan SBPAD melalui SIM SIERA dalam</p>

		bentuk kordinasi dan pelaporan.
8	Bagaimana membuat laporan pengamanan barang milik daerah kepada kepala SKPD ?	Melalui sistem pencatatan barang milik daerah berupa form sesuai aset kemudian di berikan <i>label</i> maupun <i>barcode scan</i> (QR code) dari hasil laporan pengamanan aset di sampaikan kepada kepala Sub Bidang diteruskan kepada Kepala SKPD dan diberikan persetujuan baru kemudian di inputkan kedalam SIM SIERA. Sebagai contoh Sub Bidang pengamanan, penghapusan, dan pengendalian setiap wilayah. Baik dari segi laporan perencanaan, berita acara peninjauan lapangan, mengumpulkan dokumen dari tiap SKPD/UKPD berupa (sertifikat tanah, Kartu Infentaris Barang)
9	Apakah kewenangan dari pelaksanaan sudah jelas dan digunakan dengan sebagaimana se-	Sejauh ini Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah

	mestinya ?	Kota Administrasi Jakarta Timur sangat hati-hati dalam mengkah. Kita bersegarak sesuai dengan SOP yang ada. Sesuai dengan dengan permendagri No 19 tahun 2019 mengenai Pedoman pengelolaan BMD. Dan instruksi gubernur prov. DKI Jakarta No 142 tahun 2016 mengenai Pengamanan Aset milik pemprov DKI Jakarta dan terus melakukan evaluasi.
10	Apakah hambatan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengamanan barang milik daerah?	Hambatan yang sering muncul pada saat ini, kurangnya data-data yang valid ketika melakukan pengecekan tertib dokumen sehingga memakan waktu yang lama untuk melakukan tugas yang ada, serta adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ketika masalah tanah. Karena selalu ada mafia-mafia tanah terorganisasi yang terlibat,

		sehingga di perlukan bantuan hukum baik peradilan, dan pengamanan di lapangan sampai tuntas.
11	Apa saja Tahapan dalam penanganan Aset?	Tahapan penanganan aset jika aset tersebut adalah aset yang sudah tercatat dalam Kartu Inventarisasi Barang (KIB) atau sudah memiliki sertifikat atas nama Pemda. Maka SKPD/UKPD yang memiliki aset tersebut perlu membuat surat terkait permasalahan yang di hadapi. Pihak dari kami (suku badan pengelolaan aset daerah Jakarta timur) melakukan peninjauan lapangan setelah itu berkoordinasi kembali kepada SKPD/UKPD yang terdampak, kemudian memasukan kedalam sistem pelaporan.
12	Bagaimana proses penetapan pejabat yang mengurus dan pengamanan barang milik daerah?	Proses penetapan pejabat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik

		<p>Indonesia No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Ratifikasi amanat Pasal 6 Ayat 1F dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,</p> <p>Permendagri No 19 tahun 2019 mengenai Pedoman pengelolaan BMD. Dan instruksi gubernur prov. DKI Jakarta No 142 tahun 2016 mengenai Pengamanan Aset milik pemprov DKI Jakarta.</p>
Stakeholder (Pihak Swasta)		
13	<p>Bagaimanakah efektivitas Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya saat mengamankan Aset?</p>	<p>Efektivitas Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah sejauh ini mengikuti lelang proyek pengaman aset baik dari segi pemasangan papan plang atau pemasangan pemagaran, itu kita mengikuti proses-prose yang ada, mendaftar perusahaan ke</p>

		UPPJB (unit pelayanan pengadaan barang/jasa) dan mengikuti lelang tender yang ada .
14	Apakah Faktor pendukung dan Penghambat dalam efektivitas Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur dalam mengamankan Asrt?	<p>Faktor Pendukung : adanya SIM SIERA memudahkan pihak swasta semakin banyak yang mampu mengakses serta memanfaatkan teknologi informasi baru yang dapat menunjang efektivitas, produktifitas, dan efisiensi mereka. Perkembangan teknologi informasi dalam hal ini teknologi komputer dapat menunjang pengambilan keputusan di dalam organisasi-organisasi modern yang memungkinkan pekerjaan-dapat diselesaikan secara tepat, akurat, dan efisien.</p> <p>Faktor Penghambat : Adanya kerjasama dengan pihak swasta dan dinas lain menjadikan SIERA bersifat tertutup</p>

		dan memakan waktu dalam koordinasi dan proses validasinya. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa masalah pada hardware setiap dilakukan pembaharuan maupun perbaikan sistem.
15	Alur apa saja yang harus dilalui sehingga bisa terlibat dalam mengamankan Aset milik daerah?	Menjalin kerjasama mitra dan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi Kota Administrasi,
16	Kendala dan Solusi dalam Pengamanan Barang Milik Daerah?	<p>Kendala :</p> <p>Gagal fungsi pengamanan BMN/BMD karena kurangnya pengetahuan terkait manual penggunaan dan pemeliharaan, masih adanya aset rusak berat/usang yang belum dihapuskan, masih adanya aset menganggur yang belum dimanfaatkan,</p> <p>Solusi :</p> <p>Melakukan pemeliharaan</p>

		BMN/BMD secara rutin, penganggaran biaya <i>service and maintenance</i> untuk kendaraan dan peralatan mesin secara berkala, Selalu meningkatkan pengetahuan dan kompetensi di bidang pengelolaan BMN/BMD.
17	Berapa lama masa pengerjaan dan apa konsekuensi bila tidak sesuai dengan target?	

Hasil wawancara terhadap *stakeholder* menurut Kepala Suku BPAD Jakarta Timur, Kepala Suku Bidang dan Staff Ahli Pengelola Aset sebagai responden birokrasi mengatakan bahwa BPAD sebagai sektor pengelolaan aset daerah Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) atau Unit Kerja Perangkat Desa (UKPD) memiliki fasilitas sebagai faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan program untuk pengamanan aset dengan tersedianya infrastruktur di kantor seperti (PC, komputer, laptop, printer, ATK, server, jaringan internet, serta fasilitas penunjang lainnya), namun faktor pendukung lainya seperti sistem informasi manajemen penginputan database pengamanan aset yang terintegrasi, akuntabel dan transparan memiliki peran penting dalam mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program.

Hambatan mulai dari SDM yang belum mengerti perbedaan jenis barang, hingga permasalahan pada barang yang ada di neraca. Salah satu contohnya yang paling banyak terjadi masalah adalah peralatan dan mesin (spesifikasi), seperti ada catatan di neraca tapi barang tidak ada, atau sebaliknya barang ada tapi tidak tercatat

di neraca, sehingga perlu adanya regulasi terkait sinkronisasi aset yang ada dengan SIM SIERA BPAD DKI Jakarta.

Menurut pendapat responden pihak ke-3 (swasta) bahwa suku badan pengelolaan aset daerah Kota Administrasi Jakarta Timur sudah menjalankan sistem yang terintegrasi dengan platform SIM SIERA sangat memudahkan dan semakin banyak yang mampu mengakses maupun memanfaatkan teknologi informasi baru yang dapat menunjang efektifitas, produktifitas, dan efisiensi. Perkembangan teknologi informasi dalam hal ini teknologi komputer dapat menunjang pengambilan keputusan di dalam organisasi-organisasi modern yang memungkinkan pekerjaan-pekerjaan dapat diselesaikan secara tepat, akurat, dan efisien.

Faktor penghambat adanya kerjasama dengan pihak swasta dan dinas lain menjadikan SIM SIERA bersifat tertutup karena memakan waktu dalam koordinasi dan proses validasinya. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa masalah pada *hardware* setiap dilakukan pembaharuan maupun perbaikan sistem.